

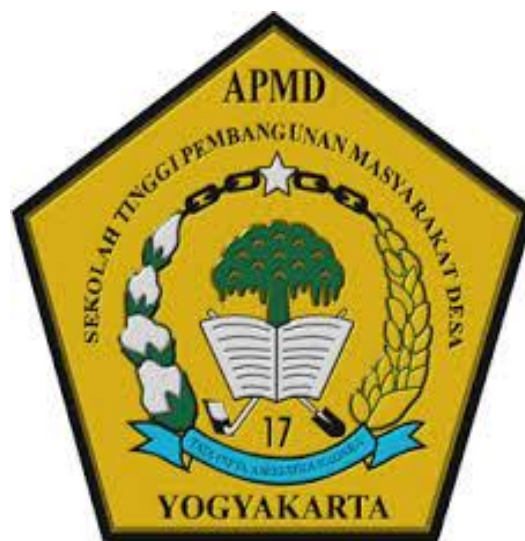
FUNGSI BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

*(Studi tentang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Irigasi tahun
2011-2015 Kabupaten Sumbawa Besar, Provinsi Nusa Tenggara Barat)*

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Guna Mencapai Derajat Keserjanaan Jenjang Strata Satu Dalam Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh :

Nama : Andryansyah

Nim : 12520002

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2016



2016

YOGYAKARTA

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Nim : 12520002

Nama : Andryansyah

Disusun Oleh :



Guna Mencapai Derajat Keserjanaan Jenjang Strata Satu Dalam Ilmu Pemerintahan

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

SKRIPSI

2011-2015 Kabupaten Sumbawa Besar, Provinsi Nusa Tenggara Barat

(Studi tentang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Irigasi tahun

FUNGSI BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

MOTTO

Apapun masalahnya, Kapan
keterbatasannya, Kalau kita bern
dan Indonesia
(Susilo Bambang
Berani mimpi untuk s
“pen

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya maka saya dapat menyelesaikan Skripsi ini. Proses penulisan hingga penyelesaian skripsi ini, tidak lepas dari banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan, baik bantuan moril maupun material.

Skripsi ini Ku persembahkan :

1. **Kepada ALLAH SWT** dengan segala Rahmat dan petunjuk-Mu, maka Engkau Ijinkan Hambamu untuk langkah meraih kesuksesan ini.
2. **Kepada Kedua orang tuaku** yang tercinta yang telah membesarkan, mendidik dan memberikan motivasi kepada saya selama ini, terimakasih banyak atas pengorbanan serta doa kalian berdua. Bagi saya persembahkan serajana ini tidak cukup untuk membalas jasa kalian, tetapi doakanlah semoga anakmu dapat menjadi anak yang berbakti dan menjadi panutan dalam keluarga.
3. **Kepada adekku “ Aldi dan Sasa”** semoga kelak kalian menyusul kakakmu ini, dan semoga kelak kau bisa lebih baik dari kakak. Amin
4. **Kepada Nenek dan alm. Kakek serta alm. Bibi “Dahlia”** yang tercinta terimakasih atas segala bantuan serta doa yang telah diberikan untuk ku sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, Semoga Kakek dan Bibi diterima disisi-Nya. Amin
5. **Buat Dosen Pembimbing ku....** Bapak terimakasih banyak atas kesabaran, bantuan, nasehat, serta ilmu tiada batas yang telah bapak berikan kepada saya demi terselesaikannya skripsi ini.
6. **Untuk Kampusku dan Almamaterku....** disinilah tumbuh kedewasaanmu akan selalu aku jaga nama baikmu !!! aku siap melangkah lebih tinggi menggapai cita-cita.
7. **Buat Sahabat-sahabatku...** J.D.Baskoro, Riza, Eka Hebi, Bang Pitu, Gilang, Yandi handsome, anak kontrakan serta teman kosku, Irvan, mas galih, didik kunyuk dan teman-teman Sumbawa. Terimakasih atas bantuan, doa, nasehat,

hiburan dan semangat yang kalian berikan dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak akan pernah aku lupakan semua kebaikan kalian.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan Anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan pada jenjang Strata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak mungkin bisa selesai tanpa bantuan dari beberapa pihak. Maka itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada;

1. Bapak Drs. Habib Muksin, M.Si selaku ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP.,MA selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan
3. Bapak Drs. Sumarjono, M,Si. selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat melaksanakan ujian sebagai koreksi demi mendekati kesempurnaan penulisan skripsi
4. Ibu Dra. Safitri Endah Winarti, M,Si. selaku dosen penguji I terima kasih atas arahan dan sarannya demi kesempurnaan penulisan skripsi saya
5. Bapak Ir. Muhammad Barori, M,Si selaku dosen penguji II terimakasih atas arahan dan sarannya demi kesempurnaan penulisan skripsi saya
6. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar khususnya Bappeda yang telah memberikan ijin dalam pelaksanaan penelitian
7. Kepada Sahabat Almamater Angkatan 2012 Prodi Ilmu Pemerintahan

Semoga kebaikan yang telah di berikan dalam rangka penyusunan skripsi ini
senantiasa mendapat karunia dan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Yogyakarta, 08 September 2016

Penulis

Andryansyah

SINOPSIS

Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengukuhkan legitimasi formal bagi institusi perencanaan di daerah (Bappeda) yang merupakan salah satu sarana penting untuk mewujudkan sistem perencanaan yang efektif dan bertanggung jawab. Maka dari itu Bappeda Kabupaten Sumbawa Besar mempunyai fungsi serta upaya yang penting terhadap proses perencanaan pembangunan daerah, melaksanakan tugas perumusan kebijakan perencanaan daerah, koordinasi penyusunan rencana yang memuat visi, misi Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, agar Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Sumbawa Besar tidak terjadi ketimpangan serta bisa lebih merata disetiap wilayahnya. Dengan demikian maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana Fungsi Bappeda dalam menjalankan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Irigasi ? Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mendiskripsikan bagaimana Fungsi Bappeda dalam menjalankan perencanaan pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi, dan Untuk mendiskripsikan Kendala yang dihadapi oleh Bappeda dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan irigasi

Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif, penelitian ini melibatkan aparat Bappeda dan perwakilan SKPD dengan narasumber/informan berjumlah 10 orang. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian Fungsi Bappeda dalam menjalankan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Perencanaan pembangunan Infrastruktur Jalan dan Irigasi agar lebih merata dan berkembang disetiap wilayah Kabupaten Sumbawa besar. Bappeda selaku badan perencana pembangunan daerah, secara normatif sudah sesuai dengan fungsi dan tugas dalam menyusun RPJMD, melakukan koordinasi antara Dinas-dinas dan Instansi terkait serta menyelenggarakan Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten guna untuk menjaring aspirasi masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Akan tetapi, dalam proses perencanaan pembangunan daerah tentang Infrastruktur Jalan dan Irigasi agar lebih merata dan berkembang disetiap wilayah Kabupaten Sumbawa Besar. Faktor yang penghambat/kendala yaitu dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas, serta fenomena pengaruh politik terhadap proses perencanaan pembangunan daerah serta adanya jaringan aspira masyarakat (jaring asmara) yang dilakukan oleh DPRD langsung ke masyarakat.

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| SINOPSIS | ix |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---|-----------|
| A. LatarBelakang | 1 |
| B. RumusanMasalahPenelitian | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. ManfaatPenelitian | 7 |
| E. Konsep Pemikiran | |
| 1. Fungsi dan Tugas Bappeda..... | 8 |
| 2. Perencanaan Pembangunan Daerah..... | 11 |
| a. Pengertian Perencanaan | 11 |
| b. Pembangunan Daerah | 14 |
| c. Perencanaan Pembangunan Daerah | 17 |
| • Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah | 21 |
| 3. Konsep Perencanaan Pembangunan Infrastruktur | 25 |
| • Pembangunan Infrastruktur Jalan..... | 28 |
| • Pembangunan Infrastruktur Pengairan | 28 |
| F. RuangLingkup | 30 |
| G. MetodePenelitian | |
| 1. JenisPenelitian | 31 |
| 2. Unit analisis | 32 |
| 3. TeknikPengumpulan Data | 33 |
| 4. TeknikAnalisis Data | 33 |

**BAB II PROFIL KABUPATEN SUMBAWA BESAR DAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)**

| | |
|--|----|
| A. Kabupaten Sumbawa Besar | 36 |
| 1. Geografis | 36 |
| 2. Topografi | 38 |
| 3. Iklim dan Curah Hujan | 38 |
| 4. Demografi..... | 40 |
| 5. Pendidikan | 45 |
| 6. Infrastruktur | 47 |
| - Rasio Jalan..... | 47 |
| - Rasio Irigasi..... | 49 |
| B. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)..... | 51 |
| 1. Deskripsi Bappeda Kabupaten Sumbawa besar | 45 |
| 2. Visi dan Misi Bappeda | 51 |
| 3. Tujuan..... | 52 |
| 4. Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda | 54 |
| Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Sumbawa Besar | 56 |
| Daftar Nama Struktur Susunan Organisasi Bappeda Kab. Sumbawa | 58 |
| Daftar Nama Pegawai Bappeda..... | 59 |

BAB III ANALISIS DATA

| | |
|--|----|
| A. Deskripsi Informan | 61 |
| 1. Deskripsi berdasarkan umur | 62 |
| 2. Deskripsi berdasarkan Tingkat Pendidikan | 62 |
| 3. Deskripsi nama informan dan jabatan | 63 |
| 4. Deskripsi menurut Jenis Kelamin..... | 64 |
| B. Analisis fungsi Bappeda dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah | 64 |
| 1. Mekanisme dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah | 65 |
| a. Proses penyusun pola dasar pembangunan daerah | 65 |
| b. Penyusunan RPJMD..... | 69 |
| c. Penyusunan Rencana Tahunan RPJP..... | 72 |

| | |
|---|----|
| 2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)..... | 75 |
| a. Proses Pelaksanaan Musrenbang | 75 |
| b. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang..... | 78 |
| c. Usulan Masyarakat di dalam Munrenbang terkait Infrastruktur Jalan dan Irigasi | 79 |
| 3. Koordinasi antara Dinas – dinas dan Instansi terkait yang berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Irigasi | 81 |
| 4. Kendala yang dihadapi Bappeda dlm perencanaan pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi yang lebih merata | 87 |

BABA IV PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 91 |
| B. Saran | 93 |

DaftarPustaka

Lampiran

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1 Peta administrasi Kabupaten Sumbawa besar | 37 |
| Gambar 2 Rata – rata suhu udara | 39 |
| Gambar 3 Perkembangan curah hujan dan hari hujan | 40 |
| Gambar 4 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin | 41 |
| Gambar 5 Sebaran jumlah penduduk menurut kecamatan (%) | 42 |
| Gambar 6 proporsi penduduk berdasarkan umur produktif dan tidak produktif..... | 44 |
| Gambar 7 Gambar Rasio Jalan | 47 |
| Gambar 8 Perbandingan panjang jalan kabupaten | 48 |
| Gambar 9 Gambar Rasio Irigasi | 49 |

Daftar Tabel

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Pembagian dan luas wilayah administrasi kabupaten Sumbawa besar | 37 |
| Tabel 1.2 Tingkat kepadatan penduduk di kabupaten Sumbawa besar | 43 |
| Tabel 1.3 Misi dan Tujuan Bappeda kabupaten Sumbawa besar | 53 |
| Tabel 1.4 Struktur organisasi dan tata kerja Bappeda kabupaten Sumbawa Besar | 56 |
| Tabel 1.5 Daftar nama Struktur susunan organisasi Bappeda kabupaten Sumbawa besar | 58 |
| Tabel 1.6 Daftar nama pegawai Bappeda | 59 |
| Tabel 2.1 Daftar Informan Menurut umur | 62 |
| Tabel 2.2 Daftar Informan Menurut tingkat pendidikan | 62 |
| Tabel 2.3 Daftar Nama informan dan jabatan | 63 |
| Tabel 2.4 Daftar informan menurut jenis kelamin | 64 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses Perencanaan Pembangunan di Indonesia pasca Undang – undang No. 25 tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana – rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

SPPN disusun dengan tujuan untuk :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Implikasi dari lahirnya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka perencanaan pembangunan tidak lagi berjalan satu arah tetapi harus memiliki muatan yang dapat memantulkan arus dua arah yang menjadi kekuatan besar untuk mengelola daerah, khususnya dalam

mengantisipasi dan mengatasi isu – isu strategis yang berkaitan dengan perkembangan kota, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengukuhkan legitimasi formal bagi institusi perencanaan di daerah yaitu Bappeda merupakan salah satu sarana penting untuk mewujudkan sistem perencanaan yang efektif dan bertanggung jawab.

Sistem perencanaan pembangunan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui pilihan – pilihan jitu dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia guna menghasilkan rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu menyeluruh dan tanggap terhadap berbagai masalah yang sedang berkembang. Perencanaan pembangunan disusun dalam berbagai skala, baik jangka panjang dua puluh tahunan, jangka menengah lima tahunan, maupun tahunan.

Rencana pembangunan jangka menengah merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program kepala daerah yang dituangkan ke dalam Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Strategis dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah, yang nantinya merupakan pedoman bagi unsur – unsur penyelenggara pemerintahan dalam penyusunan program kerja.

Untuk itu dalam memberikan pedoman yang mengarah kepada pencapaian hasil kerja yang maksimal dan manfaat, memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk itulah hakekat pembangunan dilaksanakan, disusunlah rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, untuk masa lima tahunan, sebagai bentuk strategis operasional tugas pokok dan fungsi.

Maka Mekanisme perencanaan pembangunan di daerah harus mengacu pada garis kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nas) yang disusun oleh Pemerintah Pusat tanpa meninggalkan prioritas kebutuhan pembangunan daerah.

Pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk mewujudkan suatu tujuan yang dihendaki dan dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil – hasilnya. Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Bappeda merupakan upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional di daerah sesuai dengan masalah, potensi, aspirasi, dan prioritas masyarakat daerah. Paradigma reformasi membawa konsekuensi, sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

- Kewenangan Otonomi Luas, berarti keleluasaan daerah untuk melaksanakan pemerintahan yang meliputi semua aspek pemerintahan kecuali bidang pertahanan keamanan, politik luar negeri, peradilan, agama, moneter dan fiskal serta kewenangan pada aspek lainnya ditetapkan dengan peraturan perundang – undangan. Disisi lain keleluasaan otonomi meliputi juga kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian hingga evaluasi.
- Otonomi Nyata, berarti keleluasaan daerah untuk menjalankan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh hidup dan berkembang di daerah.

- Otonomi Yang Bertanggung Jawab, berarti berwujud pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak serta kewenangan kepada daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah berupa. Pengembangan kehidupan demokrasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang sehat antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam usaha menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Semakin besarnya kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar dalam melaksanakan proses pembangunan dan memecahkan permasalahan di daerah, maka Pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar memerlukan orientasi perencanaan pembangunan yang lebih didasarkan pada semua potensi yang ada serta peluang yang dapat dikembangkan dengan menyerap aspirasi masyarakat, maka prinsip yang dapat dijadikan pegangan adalah Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Kabupaten Sumbawa Besar.

Kritik dan ketidakpuasan terhadap Bappeda sebagai institusi yang bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah, sudah lama terdengar. Kritik dan ketidakpuasan tersebut muncul karena Bappeda dinilai gagal mengemban fungsi dan tugas pokoknya yaitu menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Hal ini terjadi, menurut penilaian berbagai kalangan, karena Bappeda lebih fokus pada kegiatan administrasi perencanaan dan seremonial pembangunan dari pada kegiatan fungsional perencanaan.

Dalam era otonomi yang berorientasi pada kemandirian daerah sesuai semangat yang tertuang pada Undang – Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka azas – azas transparansi dan akuntanbel dengan

melibatkan partisipasi pemangku kepentingan harus menjadi dasar utama dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan.

Bappeda dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Besar Nomor 31 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumbawa 2005 – 2025, disebutkan bahwa prioritas pembangunan lima tahun kedua (RPJMD Tahap II Tahun 2011 – 2015) diarahkan pada semakin mantapnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan dasar terutama di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial serta pembangunan infrastruktur daerah yang mendukung agribisnis. RPJMD Kabupaten Sumbawa Besar tahun 2011 – 2015 berkewajiban menyusun Rencana Strategis Bappeda tahun 2011 – 2015 yang memuat Visi dan Misi Bappeda dalam mendukung program pembangunan daerah dengan berlandaskan tugas pokok dan fungsi sebagai institusi di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pembangunan daerah harus berlandaskan pada kepentingan daerah dan kepentingan masyarakat, misalnya pembangunan bidang infrastruktur jalan dan irigasi.

Bappeda merupakan lembaga teknis daerah yang membantu kepala daerah dalam merumuskan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Sumbawa Besar. Bappeda dituntut kemampuannya untuk menjalankan fungsi koordinasi, perencanaan pembangunan daerah dengan seluruh instansi dalam jajaran pemerintahan Kabupaten Sumbawa Besar, guna terwujudnya sistem perencanaan yang baru yang harus bersifat menyeluruh, terpadu, sistematis dan tanggap terhadap perubahan zaman serta pelaksanaan pembangunan secara serasi, terpadu, sinergi dan merata.

Maka dari itu Bappeda Kabupaten Sumbawa besar mempunyai fungsi serta upaya yang penting terhadap proses perencanaan pembangunan daerah, melaksanakan tugas perumusan kebijakan perencanaan daerah, koordinasi penyusunan rencana yang memuat visi, misi tujuan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan masing - masing satuan kerja dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati, agar Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Sumbawa Besar tidak terjadi ketimpangan serta bisa lebih merata disetiap wilayah Kabupaten Sumbawa Besar.

Pada kenyataannya terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang tidak sesuai, dimana menurut data dokumentasi dan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dari tahun 2011 hingga tahun 2015 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa Besar terus meningkat. Akan tetapi proses perencanaan pembangunan daerah tentang Infrastruktur Jalan dan Irigasi cenderung tidak merata dan belum berkembang. Hal tersebut terjadi karena pembangunan yang dilakukan cenderung hanya untuk membangun wilayah – wilayah tertentu saja di Kabupaten Sumbawa Besar.